

**REALISASI DANA ALOKASI UMUM KANTOR DPMD PROVINSI TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN BENTENG DITINJAU
DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH

MUNTIA GUSTIKA RATU

NIM 1516130004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MUNTIA GUSTIKA RATU NIM. 1516130004 dengan judul “Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Benteng Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 08 Agustus 2019 M
08 zulhijjah 1440 H

Pembimbing I


(Dr. Nurul Hak, MA)
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II


(Yosy Arisandy, MM)
NIP. 198508012014032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Benteng Ditinjau Dari Ekonomi Islam”**, oleh Muntia Gustika Ratu NIM:1516130004, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Agustus 2019 M/ 22 Zulhijjah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

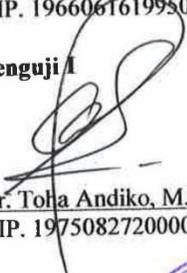
Bengkulu, 30 Agustus 2019 M
29 Zulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

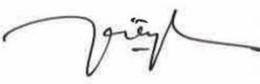
Penguji I


Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Sekretaris

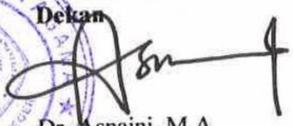

Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001

Penguji II


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,

Dekan


Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003



SURAT PERNYATAAN

NAMA : Muntia Gustika Ratu
NIM : 1516130004
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah
JUDUL : Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi
Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten
Benteng Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/](http://smallseotools.com/plagiarism-checker/) skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 2019 M
Dzulqaidah 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan



Andang Sunarto, Ph.D
NIP: 197611242006041002



Muntia Gustika Ratu
NIM: 1516130004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Benteng Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 08 Agustus 2019 M
08 Zulhijjah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Muntia Gustika Ratu
NIM 1516130004

MOTTO

- *Kalau kita ingin mendapatkan pahala maka berbuat baiklah (ma'ruf), tapi kalau kita ingin mendapatkan dosa maka berbuat buruklah (mungkar).*
- *Kalau kita ingin sukses maka rajin bekerja, berusaha dan berdoalah, tapi kalau kita ingin susah maka bermalas-malaslai.*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring do'a dan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, dan air mata serta rasa terima kasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku:

- ✦ Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang Maha agung, Maha Tinggi dan Maha penyayang atas takfir-mu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani proses kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Serta Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.
- ✦ Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah memberikan semangat, motivasi serta tiada hentinya mendoakanku dengan tulus demi tercapainya keberhasilanku. Terutama untuk Ibunda tercinta (Eka Darliana) yang tidak pernah lelah untuk mendengarkan keluhanku, ceritaku, serta tidak pernah lelah untuk memberikan semangat dan mendoakanku, Ayahku (Dedi Indra) yang selalu mendoakanku, menyemangatkuku, yang selalu gigih mencari rezeki demi biaya kuliahku.
- ✦ Adik-adikku tercinta dan tersayang. Sakina Mawwadafi yang selalu menemani kakak kemana saja untuk penyelesaian skripsi ini dan menjadi penyemangat hidup kakak. Fahri adik kakak yang selalu menyinari dan penyemangat hidup

kakak juga. Kakak sangat menyayangi kalian adik-adik. Bagiku kalian adalah segala-segalanya. LOVE YOU SO MUCH adik-adiknya kakak;

- ‡ Sahabat-sahabatku tercinta Yolandari yang selalu ada saat suka dan dukaku ,
Anggun Putri Sari yang selalu menasehatiku, dan untuk teman-teman seperjuanganku EKIS IA-8A yang dari awal sampai akhir yang selalu menemani hari-hariku dikampus.*
- ‡ Sahabat yang selalu mendukungku saat langkahku dalam mengerjakan skripsi ini adalah Lukes Alexander*
- ‡ Sahabat yang tergokil yang selalu baik dan selalu nasehatin dan juga yang selalu semangat yaitu kak zulkarnain.*
- ‡ Almamater IAIN Bengkulu yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Benteng Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Oleh
Muntia Gustika Ratu
NIM 1516130004

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realisasi dana alokasi umum kantor DPMD provinsi terhadap pembangunan ekonomi daerah DPMD Provinsi di Kabupaten Benteng dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap realisasi dana alokasi umum kantor DPMD provinsi dengan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Benteng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode kualitatif yang langsung terjun kelapangan untuk mewawancarai pihak yang bersangkutan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem realisasi dana alokasi umum dan pembangunan ekonomi daerah sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. hal ini dapat dilihat dari sistem kegiatan pembangunan yang telah ditargetkan sebelumnya dengan dana desa dan apabila sistem tersebut tidak sesuai atau belum mencapai target yang telah ditentukan maka perangkat desa yang mengelola dana tersebut berlaku jujur dan mengembalikan sisa dana yang tidak terpakai ke kas negara. oleh sebab itu, maka sistem semacam ini sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mana di dalam firman surah At-Taubah dan surah Al-Maidah ayat 119 yang mengatakan sangatlah penting untuk berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan tanpa merugikan orang lain.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pembangunan Ekonomi Daerah, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Realization of the General Allocation Fund of the Provincial DPMD Office Against Regional Economic Development in Benteng District in terms of Islamic Economy

By

Muntia Gustika Ratu

NIM 1516130004

The purpose of this study was to determine how the realization of the general DPMD office allocation funds for the provincial DPMD regional economic development in Benteng District and to find out how the Islamic Economy review of the realization of the provincial DPMD office general allocation funds with regional economic development in Benteng District. The type of research used is the type of research with qualitative methods that directly plunged into the field to interview the parties concerned. Then the data is described, analyzed and discussed to answer the problem. From the results of this study it was found that the system of realization of general allocation funds and regional economic development was in accordance with Islamic Sharia principles. this can be seen from the system of development activities that have been previously targeted with village funds and if the system is not appropriate or has not reached the specified target, then the village apparatus that manages the funds is honest and returns the remaining unused funds to the state treasury. Therefore, this kind of system is in accordance with the principles of Islamic Sharia which in the words of Surah At-Taubah and Surah Al-Maidah verse 119 which says it is very important to be honest in all aspects of life without harming others.

Keywords: *General Allocation Fund, Regional Economic Development, Islamic Economy*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Benteng Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr.H. Sirajuddin M,M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr.Asnaini, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah sabar dalam mendidik selama proses pembelajaran.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
4. Eka Sri Wahyuni, MM selaku Ketua Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing 1, yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Yosy Arisandy, MM selaku Pembimbing 2, yang telah banyak membantu, mengoreksi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

9. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Almamaterku IAIN Bengkulu.
11. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 08 Agustus 2019 M
08 Zulhijjah 1440 H

Muntia Gustika Ratu
NIM 1516130004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN PLAGIAT	
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	15
2. Waktu dan lokasi penelitian.....	15
3. Subjek/Informan penelitian.....	15
4. Sumber dan teknik pengumpulan data.....	16
a. Sumber data.....	16
1) Data primer (primary data).....	16
2) Data sekunder (secondary data).....	16
b. Teknik pengumpulan data.....	16
1) Observasi.....	16
2) Wawancara.....	17
3) Studi kepustakaan.....	18
5. Teknik analisis data.....	18
a. Analisis sebelum dilapangan.....	18
b. Analisis data dilapangan.....	19
1) Data reduction (reduksi data).....	19
2) Data display (penyajian data).....	20
3) Conclusion drawing (Penarikan kesimpulan).....	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Dana Alokasi Umum.....	22
1. Definisi dana alokasi umum.....	22
2. Dana desa.....	23
B. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	25
1. Definisi pembangunan ekonomi	25
2. Permasalahan pembangunan ekonomi.....	27
3. Persyaratan dasar pembangunan ekonomi.....	28
4. Definisi Pembangunan ekonomi daerah	29
5. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah	30
6. Strategi pembangunan ekonomi daerah	36
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Realisasi Dana Alokasi Umum dan Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Benteng	41
1. Definisi ekonomi islam	41
2. Tujuan ekonomi islam.....	42
3. Prinsip-prinsip ekonomi islam.....	43

BAB III GAMBARAN OBJEK

A. Sejarah Kantor DPMD Provinsi.....	47
B. Iklim Provinsi Bengkulu.....	47
C. Demografi Provinsi Bengkulu.....	49
D. Visi dan Misi Kantor DPMD Provinsi Bengkulu.....	50
E. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Benteng	50
F. Struktur Organisasi DPMD Provinsi Bengkulu.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng Kecamatan Pondok Kelapa.....	55
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Dana Alokasi Umum Kantor DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi dengan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Belangko Judul
- Lampiran 2 : *Check Plagiarism* Judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Surat SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Izin Selesai Penelitian
- Lampiran 13 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 15 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.¹ Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik.²

Nilai-nilai hidup yang benar adalah mencakup semua sisi dari kehidupan manusia, sehingga tidak ada satupun sisi kehidupan yang hanya bersifat duniawi dalam islam. Semua aktivitas dalam segala bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, memiliki nilai spiritual, yang ditunjukkan dalam harmonisasinya antara tujuan dan nilai dalam ajaran islam tujuan-tujuan dan nilai-nilai inilah yang benar-benar menentukan kriteria sistem ekonomi Islam.

¹ Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), h. 1.

² Muhamad Yusup Supriyatna, *Kerjasama Penggarapan Sawah dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i*, dikutip dari <http://repository.syekhnuurjati.ac.id.Pdf>, Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Pukul 19.20 WIB.

Pemahaman yang sesuai terhadap tujuan dan nilai tersebut sangat esensial bagi perspektif yang lebih baik mengenai Sistem Ekonomi Islam.³

Ekonomi Islam merupakan bagian dari Sistem Islam secara keseluruhannya. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual, dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Termasuk didalamnya adalah kehidupan berekonomi. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, perundang-undangan, tatakrama, dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.

1. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh muslim, baik itu pekerjaan ekonomi ataupun bukan bisa berubah dari pekerjaan material biasa menjadi ibadah yang berpahala apabila orang muslim tadi dalam pekerjaannya bermaksud mencari keridhoan Allah Swt.
2. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat luhur. Kedua madzab ekonomi menjadikan materialisme sebagai orientasinya. Sehingga mereka saling bertengkar untuk bersaing, memonopoli pasar-pasar dan sumber-sumber bahan baku. Persaingan ini memunculkan perang dunia baik yang pertama maupun yang kedua, bahkan memicu untuk terjadinya perang dunia ketiga atau perang nuklir antara blok kapitalisme dan sosialisme. Madzab ekonomi Islam dalam setiap aspek kegiatannya selalu

³. Prof. Dr. H. Veithzal Rizal, Dr. Abdul Hadi Sirat, Dr. Tatik Mariyanti, dan Hanan Wishasto, *Principle Of Islamic Finance (Dasar-dasar Keuangan Islam)*, (Yogyakarta: BPF, 2012), h. 5.

mengedepankan kerjasama dan bagi hasil sehingga yang terjadi adalah sifat luhur saling tolong-menolong.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Penyelewengan kegiatan ekonomi oleh sebagian pelaku ekonomi dikarenakan lemahnya pengawasan yang hanya mengandalkan kontrol negara. Dalam lingkungan ekonomi Islam ditanamkan pengawasan hati nurani yang terbina atas keyakinan akan adanya Allah Swt dan perhitungan hari akhir. Seorang muslim akan merasa tidak mampu lepas dari pengawasan Allah Swt meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia. Pengawasan dalam bentuk seperti inilah yang menjamin keselamatan tingkah laku masyarakat⁴

Dalam pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana untuk mencukupi kebutuhannya, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk keperluan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.⁵

⁴. Abul A'la Al Maududi, *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam*, terj. Adnam Syam, (Jakarta : Media Dakwah, 1985), h. 4.

⁵. Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h. 78

Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ekonomi nasional dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal. Upaya peningkatan pembangunan daerah harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerintah membangun di seluruh tanah air. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu lapangan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan ciri khas daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber fisik secara lokal (daerah).

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selalu menciptakan pertumbuhan

ekonomi, pembangunan harus berupaya untuk menghapus atau mengurangi kemiskinan. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Menurut (Mardiasmo, 2002), perlimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan mengapa demikian? karena hal ini berkaitan dengan dana pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau digenjut lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian dalam keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik.⁶

⁶ Novlie Manopo, dkk. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/45050-ID-analisis-efisiensi-dan-efektivitas-pengelolaan-keuangan-daerah-kabupaten-minahas.pdf>, pada hari senin, tanggal 6 mei 2019, pukul 19:20 WIB.

Pada bagian ini, penulis akan mengulas beberapa unsur konsep pembangunan yang Islâmi. Pembangunan ekonomi, menurut beberapa literatur pembangunan belakangan ini, adalah meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan jumlah total penduduk. Hal ini merupakan proses yang dinamis dan struktural yang akan menghasilkan perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan, aktual dan potensial. Biasanya dihitung dalam istilah per kapita dan membentang dalam kurun waktu tertentu. Substansinya terletak pada dimungkinkannya manusia untuk mengendalikan lingkungannya sekaligus untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Islâm sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islâm adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.⁷

Khurshid Ahmad, merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islâm sebagai “dasar-dasar filosofis” pembangunan yang Islâmi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Tawhîd*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allâh manusia dan manusia dengan sesamanya.

⁷ Khurshid Ahmed, “*Economic Development in an Islamic Fremwork*” dalam *Studies Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), h. 178-179.

- 2) *Rubûbiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allâh untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islâm.
- 3) *Khalîfah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allâh di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.
- 4) *Tazkiyah*, misi utama utusan Allâh adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allâh, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara. Selanjutnya, Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang Islâmi sebenarnya dapat ditarik dari konsep *tazkiyah*, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari *tazkiyah* adalah *falâh*, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat.⁸

Keempat asas tersebut secara substansial telah terimplemetasi di dalam Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia. Namun, sekilas kita bisa bertanya, mengapa hanya empat saja, dan mengapa konsep-konsep itu yang dipilih? Bagaimana halnya dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), misalnya? Padahal salah satu prinsip Islâm di bidang ekonomi adalah “keadilan” (*al-'adl*). Aspek keadilan ini sebenarnya terdapat dalam asas *tazkiyah*. Maka, bagi kita sebenarnya bisa memilih teori yang dianggap sejalan dengan yang sedang kita pikirkan di Indonesia, yang kita sebut

⁸ Khurshid Ahmed, *Economic Development...*, h. 180.

dengan Ekonomi Pancasila. Asas *tawhîd*, *khalîfah* dan *tazkiyah* pada akhirnya menuju keperwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Asas *tawhîd* mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi. Asas *khalîfah* mencegah kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya. Dan asas *tazkiyah* mencegah kepincangan sosial dan mewujudkan pemerataan yang bermuara pada keadilan. Kesemuanya itu akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya adalah pelaksanaan asas *rubûbiyah*, yakni asas pendidikan, pemeliharaan dan kontinuitas menuju kepada kesempurnaan, seperti sifat *Ilâhî*. Dengan demikian, jika keempat nilai yang dirumuskan oleh Khursyid Ahmad tersebut dapat terealisasikan dalam pembangunan ekonomi yg dibangun di Indonesia, maka negara akan dengan mudah mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu negara yang sejahtera dan berkeadilan.⁹

Dana Alokasi Umum adalah salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang pengalokasiannya didasarkan atas FORMULA dengan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Dana Alokasi Umum bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah horizontal *imbalance* yang dialokasikan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grants*). Konsep dasar formulasi Dana Alokasi Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25/1999 itu secara

⁹ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993), h. 70-71.

implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental* transfer yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi *fiscal gap* nantinya kesenjangan *fiscal* yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat.¹⁰

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di kabupaten benteng kecamatan pondok kelapa, diketahui bahwa pembangunan disana tidak sesuai dengan yang telah diberikan dana oleh pemerintah yang diawasi kantor DPMD. Yang seharusnya dibangun untuk jalan agar masyarakat tidak terhambat perjalanan ternyata digunakan dengan hal yang lain. Dapat disimpulkan dari latar belakang diatas peneliti tertarik dengan masalah ***“Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah dikabupaten Benteng ditinjau dari Ekonomi Islam”***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Realisasi dana alokasi umum kantor DPMD provinsi terhadap pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Benteng?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap realisasi dana alokasi umum kantor DPMD provinsi dengan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Benteng?

¹⁰. Mawarni¹, Darwanis, dan Syukriy Abdullah, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh),” *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, II (Mei, 2013).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana realisasi dana alokasi umum kantor DPMD provinsi terhadap pembangunan ekonomi daerah DPMD di Kabupaten Benteng.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap realisasi dana alokasi umum kantor DPMD provinsi dengan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Benteng.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan deskriptif kepada akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak lainnya tentang realisasi dana alokasi umum kantor DPMD Provinsi terhadap pembangunan ekonomi daerah dikabupaten Benteng ditinjau dari Ekonomi Islam.

2. Kegunaan praktis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam meningkatkan kompetensi diri, intelektualitas serta emosional dalam bidang ekonomi Islam khususnya mengenai realisasi dana alokasi umum kantor DPMD Provinsi terhadap pembangunan ekonomi daerah DPMD dikabupaten Benteng ditinjau dari Ekonomi Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang ekonomi Islam khususnya di Indonesia masih sangat terbatas. Terkait tema penelitian ini yaitu “*Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi Terhadap Pemabangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng Ditinjau dari Ekonomi Islam*”. Ada beberapa penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai studi pendahuluan diantaranya ialah:

- a. Savarita Pitri, *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2018*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di desa kecamatan natar, masih terdapat adanya jalan yang rusak dan tidak adanya pembuatan sumur gali. Pengelolaan alokasi dana desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan alokasi dan desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan. Penelitian tersebut membahas masalah pengelolaan manajemen dana desa dalam pembangunan desa apakah sumber daya manusia nya sudah dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat disana atau tidak. Sedangkan penelitian realisasi dana alokasi umum kantor DPMD provinsi dalam pembangunan ekonomi daerah apakah dana yang diberikan kantor DPMD provinsi untuk pelaksanaan

pembangunan yang telah ditentukan dan disepakati dikabupaten benteng sudah sesuai atau belum datanya dan penggunaan dananya. Persamaan penelitian ini yaitu pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan informasi berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

- b. Erlinda Dwi Nopitasari, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal, 2007*. Dengan rumusan masalah Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Apakah Produk Domesti Regional Bruto berpengaruh terhadap Belanja Modal? Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal. Beragam penelitian tentang Belanja Modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain, Mayasari, Sinawati dan Yuniarta (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Abdullah dan Halim (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Andaiyani (2013)

menyatakan bahwa Pengaruh Index Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Belanja Modal. Tetapi Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Oprasional tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Maimunah (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpegaruh terhadap Belanja Modal. Darwanto dan Yustikasari (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh Terhadap Belanja Modal. Harianto, David dan Adi (2007) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Penelitian dilakukan berdasarkan Riset gep dan penelitian sebelumnya yaitu Penelitian Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Paramartha dan Budiasih (2016), Mentayani dan Rusmanto (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Penelitian menggunakan rujukan utama dari penelitian Mayasari dan Yuniarta (2014). Perbedaannya Penelitian ini, pengelolaan dana alokasi umum untuk diberikan dalam pembangunan desa sesuai kesepakatan berapa dana atas permintaan pihak kedua dan sudah terlaksana apa belum dan datanya sesuai apa tidak pihak pertama dan pihak kedua tersebut dan metode yang digunakan berbeda.

persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan dana alokasi umum.¹¹

- c. Erwin Ginting yang berjudul “*Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo*”. Dengan rumusan masalah bagaimana pengalokasian dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dalam belanja pada pemerintahan kabupaten karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelokasian dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) dalam belanja pemerintahan kabupaten karo. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum dengan jumlah yang sangat besar merupakan sumber dana utama bagi daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari. Sedang pendapatan asli daerah sebagai pencerminan kemampuan daerah juga berperan walaupun tidak secara keseluruhan. Perbedaannya, penelitian ini lebih terarah ke sumber dana dan peneliti ini menggunakan metode data campuran yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Dalam Persamaan penelitian ini pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan informasi berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari

¹¹. Erlinda Dwi Nopitasari, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal, 2007*, skripsi, [http: file:///C:/Users/HP/Downloads/1.%2520Erlinda%2520dwi%2520nopitasari.pdf](http://file:///C:/Users/HP/Downloads/1.%2520Erlinda%2520dwi%2520nopitasari.pdf).

orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan berpaengaruh positif masalah yang ditelitinya.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik¹³.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kabupaten Benteng. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pada kantor DPMD kabupaten Benteng pembangunannya tidak sesuai yang diharapkan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pegawai kantor di kabupaten benteng, seperti pihak pemberi dana dan penerima dana.

¹². Erwin Ginting, *Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo*, skripsi, [http://C:/Users/HP/Downloads/08E01542\(1\).pdf](http://C:/Users/HP/Downloads/08E01542(1).pdf).

¹³. Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 2.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah realisasi dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah kantor DPMD dikabupaten benteng.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan alat bantu kuesioner, wawancara dan observasi. Data primer meliputi karakter personal (pengetahuan, status ekonomi, umur), karakteristik situasional (bagi hasil/keuntungan relatif/aksesibilitas) dan pembangunan desa kabupaten benteng sesuai dengan ekonomi Islam (observabilitas, dan kompatibilitas).

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa hasil dari kajian pustaka yang mendukung penulisan penelitian ini yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Teknik observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi diklasifikasikan menjadi observasi partisipatif, observasi yang secara terang-terangan dan observasi yang tak berstruktur.

Dengan melakukan observasi peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, memperoleh pengalaman langsung serta dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif.

2. Teknik wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam¹⁴. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik wawancara terstruktur yakni dengan menggunakan instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada setiap responden.

Selain itu, dalam teknik ini, penulis dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

Hasil wawancara/*interview* atau pencatatan/perekaman (audio atau video) interaksi dan atau kejadian dijelaskan atau dituliskan

¹⁴. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014) h. 224-232.

kembali (ditulis dalam format teks atau ditangkap dalam bentuk identifikasi yang jelas dari sub-element. Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana realisasi dana alokasi umum kantor DPMD provinsi terhadap pembangunan ekonomi daerah dikabupaten benteng ditinjau dari ekonomi Islam.

3. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data sekunder mengenai realisasi dana alokasi umum kantor DPMD provinsi terhadap pembangunan ekonomi daerah kantor DPMD dikabupaten benteng ditinjau dari ekonomi Islam.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

Proses analisis data terdiri dari :

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta., 2005) h. 244.

Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan. Analisis ini di lakukan dengan cara membaca skripsi dan penelithan terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk melakukan pengembangan atau pendalaman penelitian.

b. Analisis data dilapangan

1) *Data reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Analisis ini dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu subjek dan objek yang akan diteliti, kemudian membuat pertanyaan seputar tentang Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Kantor di Kabupaten Benteng. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan terlebih dahulu mengenai subjek dan objek atas permasalahan yang akan diangkat setelah itu akan dilakukan kegiatan merangkum untuk menentukan pola penyelesaian dalam meninjau setiap permasalahan yang ditemui peneliti. Seperti misalnya dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada siapa saja pelaku manajemen keuangan kantor DPMD provinsi

dalam memberikan dana untuk pembangunan ekonomi daerah dikabupaten Benteng.

2) *Data display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan setiap fokus permasalahan yang diangkat yakni mengenai Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng.

3) *Conclusion drawing*

Conclusion drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel¹⁶.

Dalam tahap ini peneliti telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kegiatan merangkum permasalahan awal dengan menentukan subjek dan objek pada permasalahan yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 245-252.

menjadi fokus penelitian, setelah itu peneliti juga sudah menguraikan fokus penelitian hingga dapat ditemukan kesimpulan awal bahwa dana yang diberikan tidak dengan pembangunan yang dilakukan dikabupaten benteng tersebut saat disurvei sementara. Jadinya saya mengambil judul masalah *Bagaimana Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Kantor DPMD dikabupaten Benteng ditinjau dari Ekonomi Islam.*

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dana Alokasi Umum

1. Definisi dana alokasi umum

Dana Alokasi Umum (DAU) PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri *netto* yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Alokasi Umum adalah salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang pengalokasiannya didasarkan atas FORMULA dengan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Dana Alokasi Umum bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah horizontal *imbalance* yang dialokasikan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grants*).

Konsep dasar formulasi Dana Alokasi Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25/1999 itu secara *implisit* merupakan penjabaran dari teori *governmental* transfer yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi *fiscal gap* nantinya kesenjangan *fiscal* yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat.¹⁷

2. Dana desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dana desa adalah untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang dibiayai oleh dana desa dalam melaksanakan program dan kegiatan.¹⁸

¹⁷. Mawarni1, Darwanis, dan Syukriy Abdullah, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh),” *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, II (Mei, 2013).

¹⁸. *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*, (Jakarta: kementriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018), h. 5.

Dalam pasal 5 Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain:¹⁹

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Lingkungan pemukiman
 - 2) Transportasi
 - 3) Energi
 - 4) Informasi dan komunikasi
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Kesehatan masyarakat
 - 2) Pendidikan dan kebudayaan
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa, meliputi:
 - 1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan
 - 2) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada

¹⁹. *Penetapan Prioritas...*, h. 14.

- pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- 3) Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 - 2) Penanganan bencana alam
 - 3) Pelestarian lingkungan hidup
 - e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

B. Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran [*Income per-kapita*] dalam jangka panjang. Kemakmuran itu sendiri ditunjukkan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto atau GDP) adanya keseimbangan antara supply dan demand di pasar.

Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi memiliki dua sifat yaitu yang pertama bersifat deskriptif analisis dan kedua bersifat pilihan kebijakan. Berdasarkan kedua sifat tersebut, maka Arsyad (1999) mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.²⁰

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Dengan demikian pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per-kapita, karena kenaikan tersebut merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang digambarkan dengan tingkat pertambahan GDP/GNP. Namun demikian, ada kemungkinan pertambahan GDP/GNP sama dengan atau lebih rendah dari pada tingkat pertambahan penduduk, maka pendapatan perkapita akan tetap atau menurun, sehingga pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.²¹

Pada umumnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan

²⁰. Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 9.

²¹. Subandi, *Ekonomi Pembangunan...*, h. 14.

semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.²²

2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi

- a. Berkembangnya cita-cita negara-negara yang baru merdeka untuk dapat mengejar ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Negara-negara yang baru merdeka tersebut relatif miskin dan juga mengalami masalah kependudukan yang kronis. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan dalam rangka menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Berkembangnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan (khususnya pembangunan ekonomi) di NSB. Fenomena ini didorong oleh rasa kemanusiaan negara-negara maju untuk membantu NSB dalam mempercepat laju pembangunan ekonomi mereka agar dapat mengejar ketertinggalan mereka dari Negara-negara maju. Selain itu, ada juga pertimbangan lain yaitu untuk mendapat dukungan dalam perang ideology antara Blok Barat dengan Blok Timur pada masa itu.

²². Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3.

3. Persyaratan Dasar Pembangunan Ekonomi

a. Atas dasar kekuatan sendiri

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga negara itu sendiri.

b. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar

Syarat kedua berkaitan dengan usaha menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.²³

c. Perubahan struktural

Perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal. Perubahan struktural semacam ini menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak, dan produktivitas buruh stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi.²⁴

²³. M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 41.

²⁴. M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan...*, h. 43.

d. Pembentukan modal

Pembentukan modal merupakan faktor paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai “kunci utama menuju pembangunan ekonomi”. Sekali proses ini berjalan, ia akan senantiasa menggumpal dan menghidupi dirinya sendiri. Proses ini berjalan melewati tiga tingkatan:

- 1) Kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung
- 2) Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat diinvestasikan
- 3) Penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan. Pembentukan modal juga berarti pembentukan keahlian karena keahlian kerap kali berkembang sebagai akibat pembentukan modal²⁵

4. Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan

²⁵ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan...*, h. 47.

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.²⁶

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.²⁷

5. Permasalahan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

a. Ketimpangan pembangunan sektor industri

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pembangunan ekonomi di

²⁶. Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 374.

²⁷. Subandi, *Ekonomi Pembangunan...*, h. 133.

daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasinya ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga rendah. Kurang berkembangnya sektor industri diluar Jawa merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antara jawa dengan wilayah diluar jawa. Pada daerah di luar Jawa, seperti sumatera, Kalimantan Timur, Papua, bisa menjadi wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor industri manufaktur.

Hal ini dapat dilihat dari dua hal yaitu: (1) ketersediaan bahan baku, (2) Letak Geografis yang dekat dengan negara tetangga yang bisa menjadi potensi pasar yang besar di samping pasar domestik.

1) Kurang meratanya investasi

Harrod-Domar ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.

2) Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapitas antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan

tingkat pendapatan perkapita antar daerah, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya kebijakan pemerintah) mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah. Menurut A. Lewis, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik (dalam pengertian pareto optimal: semua daerah mengalami *better off*)

3) Perbedaan sumber daya alam (SDA)

Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin SDA. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut dapat dibenarkan, dalam arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, dan selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus. Dan untuk itu diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya adalah faktor teknologi dan sumber daya manusia.

4) Perbedaan demografis

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja.

Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran.

Di sisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

5) Kurang lancarnya perdagangan antar daerah

Kurang lancarnya perdagangan antara daerah (*intro-trade*) juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya *intro-trade* disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, kelangkaan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer (mendukung) dengan barang dan jasa tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barang modal, input perantara, bahan baku atau

material lainnya dapat menyebabkan kegiatan ekonomi suatu daerah lumpuh atau tidak berjalan secara optimal.²⁸

b. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah

Teori pembangunan yang ada sekarang ini sudah tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan alternatif untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Rumusan ini sebenarnya merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Seperti kita ketahui bersama bahwa kerangka berpikir dalam konsep pembangunan ekonomi daerah yang lama adalah:

- 1) Dalam rangka memberikan kesempatan kerja, maka semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja.
- 2) Basis pembangunan terletak pada pengembangan sektor ekonomi.
- 3) Pengalokasian aset-aset didasarkan pada keunggulan komparatif aset-aset fisik.
- 4) Sumber daya pengetahuan didasarkan pada ketersediaan angkatan kerja.

²⁸. Subandi, *Ekonomi Pembangunan...*, h. 134.

Sedangkan dengan paradigma baru pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pekerjaan (memberikan kesempatan kerja) yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Untuk basis pembangunan tidak lagi berdasarkan sektor tetapi lebih pada pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru, pengalokasian aset-aset didasarkan pada keunggulan kompetitif yang didasarkan pada kualitas lingkungan. Disamping itu juga sumber daya pengetahuan dijadikan sebagai pembangkit pertumbuhan, ekonomi daerah. Untuk lebih jelas tentang pendekatan tersebut dapat dilihat pada sajian tabel dibawah ini:²⁹

Tabel 10.1

Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan Kerja	Semakin Banyak Perusahaan=semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga

²⁹. Subandi, *Ekonomi Pembangunan...*, h. 136.

		ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan Kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya Pengetahuan	Ketersediaan Angkatan Kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

6. Strategi pembangunan ekonomi daerah

Sebelum membahas strategi pembangunan ekonomi daerah, kita coba mengingat kembali tujuan strategi pembangunan ekonomi. Secara umum strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.

Secara garis besar strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999) dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

a. Strategi pengembangan fisik (*Locality or Physical Development Strategy*)

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalisasi daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona (*amenity base*) atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (*civic center*) dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain:

- 1) Pembuatan bank tanah (*landbanking*), dengan tujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya, dan sebagainya
- 2) Pengendalian perencanaan dan pembangunan, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah

- 3) Penataan kota (*townscaping*), dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan, dan penetapan standar fisik suatu bangunan
 - 4) Pengaturan tata ruang (*Zoning*) dengan baik untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah
 - 5) Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, di samping menciptakan lapangan kerja
 - 6) Penyediaan infrastruktur seperti: sarana air bersih, listrik, taman, sarana parkir, tempat olahraga, dan sebagainya
- b. Strategi pengembangan dunia usaha (*Business Development Strategy*)

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain:

- 1) Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- 2) Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah

daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.

- 3) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan.
 - 4) Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis.
 - 5) Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar baru.
- c. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development Strategy*)

Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelatihan dengan sistem *customized training*, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja
- 2) Pembuatan bank keahlian (*skillbanks*), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di daerah
- 3) Penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah
- 4) Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat

d. Strategi Pengembangan Masyarakat (*Community-Based Development Strategy*)

Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan (*empowerment*) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Indonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.³⁰

³⁰. Subandi, *Ekonomi Pembangunan...*, h. 138.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Realisasi Dana Alokasi Umum dan Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Benteng

1. Definisi ekonomi islam

Ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur'an al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.³¹

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai *derivasi* dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya.³²

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang

³¹. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

³². P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 13.

didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi.³³

2. Tujuan Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk:

- a. membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material.
- b. membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
- c. menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- d. menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, adil dalam produksi diwujudkan dalam

³³. P3EI, *Ekonomi Islam...*, h. 13.

bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak meningkat.³⁴

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:

a. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di Bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF.

³⁴. Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h. 3.

1) *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang Muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

2) *Tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat tabligh ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

3) *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

4) *Fathanah* (intelektual)

Fathanah, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan Ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.³⁶ (Q.S. At-Taubah:119).

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling besar”.³⁷ (Q.S. Al-Maidah:119)

Dilihat dari berbagai sudut pandang sistem realisasi dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. hal ini dapat dilihat dari sistem kegiatan

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h. 18.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma), h. 206.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma), h. 127.

pembangunan yang telah ditargetkan sebelumnya dengan dana desa dan apabila sistem tersebut tidak sesuai atau belum mencapai target yang telah ditentukan maka perangkat desa yang mengelola dana tersebut berlaku jujur dan mengembalikan sisa dana yang tidak terpakai ke kas negara. oleh sebab itu, maka sistem semacam ini sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mana di dalam firman surah At-Taubah dan surah Al-Maidah ayat 119 yang mengatakan sangatlah penting untuk berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan tanpa merugikan orang lain.

BAB III

GAMBARAN OBJEK

A. Sejarah Kantor DPMD Provinsi

DPMD Provinsi Bengkulu yang beralamatkan Jl. Cendana No. 18 Sawah lebar Kota Bengkulu, Berdasarkan sejarahnya, telah beberapa kali berubah nomenklatur:

1. Tahun 1969, Direktorat Pembangunan Desa (Dit BangDes).
2. Tahun 1989, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dit PMD).
3. Tahun 2000, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)
4. Tahun 2008, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).
5. Tahun 2016 s/d sekarang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

B. Iklim Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu berada di daerah pantai dan pesisir barat provinsi Bengkulu, sehingga suhu udara lebih panas dari pada daerah pedalaman dan pegunungan suhu rata-rata daerah pesisir 26° C, Sedangkan suhu udara terpanas (maksimum) pernah tercatat 36° - 37° C. Daerah pantai barat beriklim tropis. Suhu udara yang terendah yang pernah tercatat adalah 10° C, Di daerah ini pada hakikatnya dipengaruhi oleh angin musim dan angin passat tenggara.

Oleh karena itu itu Bukit Barisan membagi pulau Sumatera menjadi beberapa bagian daerah hujan antara lain daerah lereng bagian timur Bukit Barisan termasuk sebagian besar daerah Kabupaten Rejang Lebong. Di pantai zakat angin musim barat laut yang berembus antara bulan Desember sampai dengan bulan Maret menurunkan hujan di daerah bagian barat. Antara Bulan Mei sampai dengan Oktober di daerah pegunungan seperti puncak Gunung Lumut, bertiup angin yang kuat ke arah barat dan barat daya.

Tetapi angin-angin ini tidak mempengaruhi daerah-daerah yang lebih rendah, sedangkan di puncak gunung Sebelat angin ini bertiup Bulan Februari dan mengakibatkan hujan di daerah Muara Aman - Curup, musim panas jatuh pada Bulan Juli sampai dengan September. Pada musim kemarau angin bertiup dari arah yang berlawanan dari yang tersebut diatas yakni dari arah timur tenggara. Angin ini merupakan angin darat yang kering yang menyebabkan apa yang disebut musim pancaroba yang biasa terjadi pada Bulan Mei – Oktober.

Pada musim hujan (musim barat laut) sering terjadi cuaca buruk terutama di laut. Kecepatan rata-rata sampai dengan 10 km/jam. Pada cuaca buruk kecepatan angin dapat mencapai 40 sampai dengan 60 km per jam. Musim yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi di bulan Desember-Maret dan musim kemarau yang terjadi di Bulan Juni - September. Sementara pada Bulan April - Mei dan Oktober - November merupakan masa peralihan atau pancaroba.

C. Demografi Provinsi Bengkulu

Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 mencapai 1.844.788 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 1.814.357 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 sebesar 104. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Bengkulu, rasio jenis kelamin perempuan tertinggi adalah di Kabupaten Mukomuko yaitu 109.

Sedangkan rasio jenis kelamin di bawah 104 ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu masing-masing 101, 103, dan 101.

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk kurang dari 15 tahun meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai bagian dari aspek demografi memiliki kecenderungan meningkat atau menurun sesuai perubahan yang dialami oleh penduduk. Hal ini dikarenakan faktor alamiah, yakni kelahiran, kematian, dan pergeseran jumlah penduduk.

Angka pengangguran didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu tahun 2014 sebanyak 900.054 orang sedangkan tingkat pengangguran sebesar 3,47 persen.

D. Visi dan Misi Kantor DPMD Provinsi Bengkulu

1. Visi

Mewujudkan desa maju, mandiri, sejahtera berbasis keunggulan lokal.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi percepatan peretasan desa tertinggal adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa
- b. Mewujudkan percepatan pembangunan desa dalam rangka peretasan desa tertinggal
- c. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Mewujudkan sinergitas pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan daerah tertentu³⁸

E. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Benteng Kecamatan Pondok Kelapa

Kecamatan pondok kelapa sebagai salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Bengkulu tengah provinsi Bengkulu yang berpartisipasi dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD). Kecamatan pematang tiga terdiri atas 17 desa yang semuanya merupakan daerah/desa-desa yang memasuki tahun kedua dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD).

Kecamatan pondok kelapa memiliki luas wilayah 17.856 km persegi dengan batas wilayah:

- Sebelah barat berbatasan dengan pantai
- Sebelah selatan berbatasan dengan kota Bengkulu
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan pondok kubang

³⁸Rohidin Mersyah, *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu*, dikutip dari <http://dpmd.bengkuluprov.go.id/index.php>, Pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, Pukul 20.25 WIB

- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan air napal Bengkulu utara

Dengan jumlah penduduk 25.635 jiwa, jumlah kepala keluarga 5.725 KK, komposisi penduduk di desa-desa kecamatan pondok kelapa sangat beragam yang terdiri dari berbagai suku baik suku pendatang maupun penduduk asli yang mayoritas dari suku rejang dan suku jawa. Selain itu penduduk desa kecamatan pondok kelapa memiliki mata pencaharian mayoritas petani sawit dan karet sedangkan beberapa desa penduduknya sebagai nelayan.

Kesamaan potensi pertanian di beberapa desa merupakan suatu kesempatan desa dalam melakukan kerjasama antara desa didesa dengan membentuk badan usaha milik desa (BUMDES) dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada didesa sehingga lebih memajukan lagi perkebunan sawit penduduk. Selain pertanian di beberapa desa yang mata pencahariannya sebagai nelayan juga bisa melakukan beberapa kerjasama, dalam hal melakukan kerjasama dalam bentuk pemasaran hasil dari nelayan tersebut sehingga ikan yang dihasilkan penduduk nelayan bisa dijual tanpa mereka harus menunggu dan menjual sendiri.

Kecamatan pondok kelapa memiliki 17 desa yang sudah mandiri karena sudah menjalankan pemerintahan secara sendiri baik dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa kecamatan pondok kelapa melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, hal ini dapat dilihat dari

adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggung Jawaban dan Surat Pertanggung Jawaban setiap desa dan dokumen desa disusun atas musyawarah desa yang bersifat partisipatif, transparansi, akuntabel, dan demokrasi.

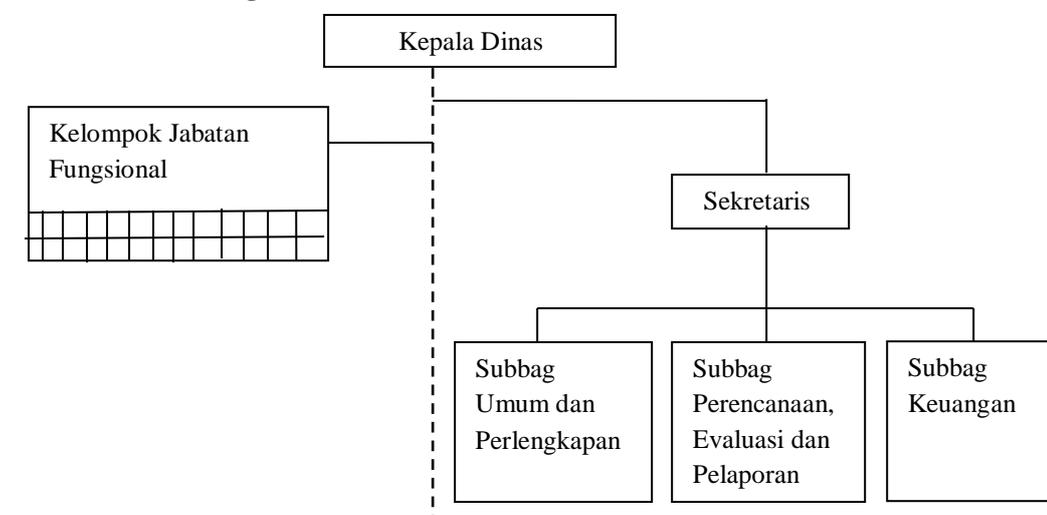
Apdes merupakan anggaran belanja desa yang merupakan rencana belanja desa dalam setahun. Dalam hal ini desa memiliki sumber dana dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil, adapun Dana Desa kecamatan pondok kelapa sebagai berikut:³⁹

No	Desa	DD (Rp)	ADD (Rp)	DBH (Rp)
1	Talang pauh	769.253.622	363.471.430	5.836.171
2	Srikton	751.407.498	315.280.632	5.440.665
3	Pekik nyaring	812.984.638	403.281.222	3.240.947
4	Pasar pedati	879.384.009	412.709.857	3.345.178
5	Sunda kelapa	795.387.214	343.566.536	3.326.718
6	Pondok kelapa	831.728.034	403.281.222	3.894.029
7	Padang betuah	798.830.717	324.709.266	3.954.860
8	Sidorejo	785.237.782	334.137.902	3.358.238
9	Sidodadi	833.490.056	405.376.474	4.039.269
10	Talang boseng	757.660.189	315.280.632	4.295.864
11	Pagar dewa	749.820.610	315.286.632	3.310.193

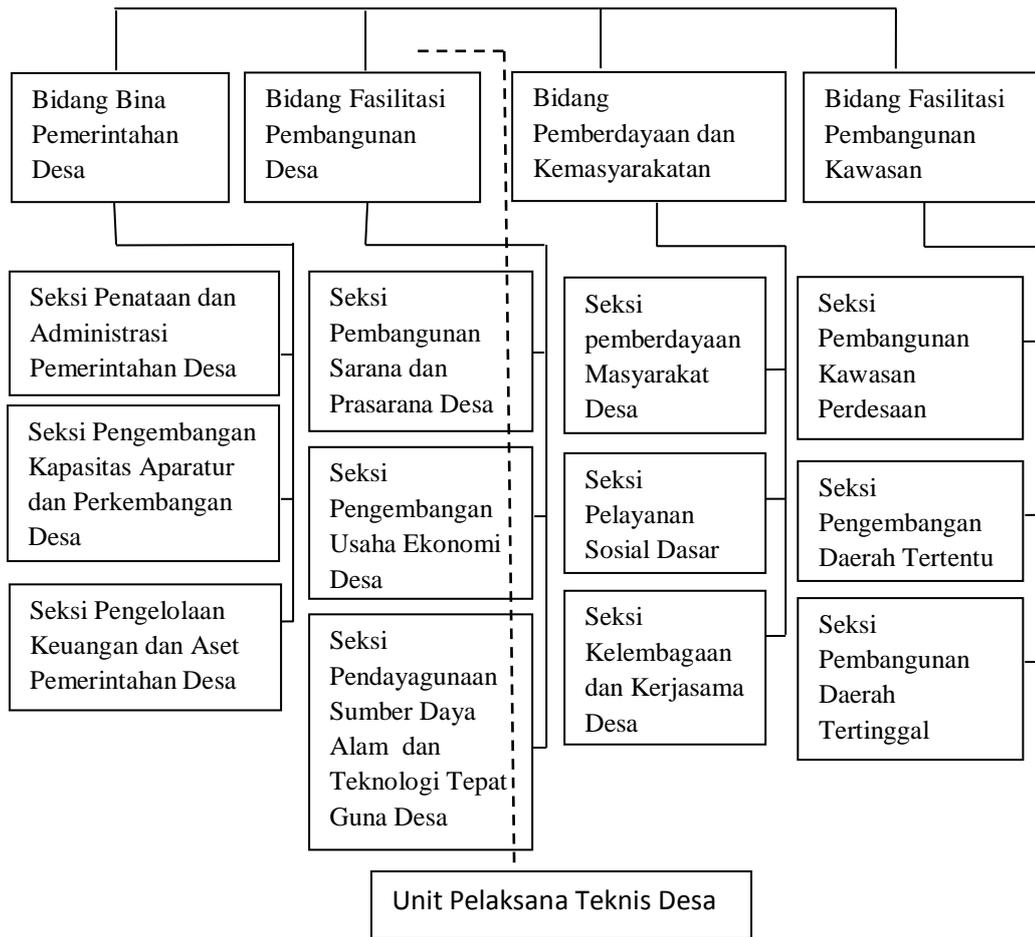
³⁹Pendamping Desa, *Laporan Bulanan Bulan April 2019*, (Bengkulu: SATKER, 2019), h. 22

12	Kembang ayun	761.055.452	324.709.266	2.884.174
13	Panca mukti	763.115.475	315.280.633	3.752.442
14	Srikuncuro	785.266.758	334.137.902	2.823.959
15	Bintang selatan	758.838.833	315.280.633	2.715.677
16	Abu sakim	783.468.653	349.852.392	2.758.914
17	Harapan	769.264.856	330.995.022	3.954.362

F. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu⁴⁰



⁴⁰Rohidin Mersyah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Bengkulu, dikutip dari <http://dpm.d.bengkuluprov.go.id/index.php/downloads/sekretariat/250-visi-dan-misi-dinas-pmd-provinsi-bengkulu>, pada hari rabu, tanggal 12 Juni 2019, pukul 14:30 WIB



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng Kecamatan Pondok Kelapa

Dana alokasi umum disebut juga dengan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja. Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengetahuan tentang masalah Dana Desa terhadap

pembangunan ekonomi daerah dikabupaten benteng kecamatan pondok itu ada dana yang bermasalah pada suatu desa tersebut.

Berikut akan disajikan hasil temuan dari wawancara tentang dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah dikabupaten benteng kecamatan pondok kelapa dari beberapa informan:

Bagaimana realisasi dana alokasi umum kantor DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi Bengkulu terhadap pembangunan ekonomi daerah dikabupaten benteng kecamatan pondok kelapa?

Menurut Bapak Elfrello sebagai kepala bidang pemberdayaan masyarakat dan desa DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi Bengkulu. Dana yang turun untuk pembangunan ekonomi daerah dikabupaten benteng tersebut tidak ada dari kantor DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi Bengkulu sebab dana tersebut langsung transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten dalam arti ke kas daerah kabupaten. Nanti dari kas daerah kabupaten transfer lagi ke Rekening Kas Umum Desa dengan catatan harus ada Peraturan Bupati penggunaan dana desa dan alokasi desa dan harus ada erat dalam istilah bahasa kantor tersebut disebut dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan sebagai syarat kantor tersebut. Karena dana tersebut juga langsung di transfer berdasarkan aturan kementerian keuangan.⁴¹

Menurut Bapak Afrizan Joni bagian sekretariat Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam dana desa ada beberapa hambatan yaitu:⁴²

1. Lambatnya pencairan dana desa tahap ketiga disebabkan desa lambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap kesatu dan tahap kedua. Contoh: talang boseng, kembang ayun, dan pagar dewa
2. Dana desa belum optimal untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan kesejahteraan masyarakat peningkatan kualitas SDM didesa serta penanggulangan kemiskinan didesa disebabkan desa masih masih menggunakan dana desa melaksanakan kegiatan belum menyentuh secara langsung kepada kebutuhan masyarakat desa

⁴¹. Elfrello, *Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019.

⁴². Afrizan Joni, *Sekretariat Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2019.

3. Belum optimalnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa oleh masyarakat desa karena masih ditemukannya rendahnya partisipasi masyarakat yang belum optimalnya transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa
Menurut Bapak Darlin Kasim Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar dalam Dana Desa ada beberapa hambatan ditahun 2018 yaitu:⁴³

1. Tidak transparannya Mantan Kepala Desa (Hamdani) dalam mengelola Dana Desa Tahun 2017 untuk pembangunan ekonomi daerah
2. Tidak adanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pengurus Badan Usaha Milik Desa atas Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2017
3. Dana Desa telah dilakukan pencairan sebanyak 3 Tahap oleh Pemerintah Desa dan telah digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Menurut Bapak Ice Agustin Tenaga Ahli Infrastruktur Desa bahwa musdes dan musrembangdes Tahun Anggaran 2018 belum dilaksanakan, sehingga berdampak pada terhambatnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga berdampak pada lambatnya pencairan Dana Desa Tahap I, Dana Desa Tahap I masih dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Definitif Baksir Aliama dan Bendahara Desa Anak kandungnya Meri, Dana Desa Tahap I digunakan sebagian untuk membayar Siltap Perangkat Desa karena Alokasi Dana Desa belum cair, setelah Alokasi Dana Desa cair maka Kepala Desa menggunkan sisa Dana Desa ditambahkan sebagian Alokasi Dana Desa untuk membangun membuka badan jalan usaha tani dengan Volume 2000 M x 4 M dengan biaya sekitar 117 jutaan ke atas (sesuai pagu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018). Total pencairan Dana Desa Tahap I (20%) sekitar 134 jutaan ke atas, setelah pencairan Dana Desa Tahap I Kepala Desa definitif habis masa jabatan dan diangkat Pejabat Sementara. Kepala Desa (Widiawan/Staf Kecamatan Pagar Jati), sehingga pencairan Dana Desa Tahap II dilakukan oleh Pejabat Sementara. Kepala Desa digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan di Jalan Usaha Tani sepanjang 4 M dengan biaya sekitar 38 jutaan (Pagu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), kegiatan pembangunan Platdeuker dengan biaya sekitar 9 jutaan (Pagu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan masih ada Sisa Dana yang belum terpakai di Tangan Pejabat Sementara Kades sebesar 74 jutaan ditambah Dana Desa Tahap II yang dipegang Bendahara Desa sebesar 145 jutaan jadi total Dana Desa Tahap II yang belum direalisasikan sebesar 219 jutaan.⁴⁴

Menurut Nilla Operator Komputer bahwa bagian Tenaga Ahli

⁴³. Darlin Kasim, *Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2019.

⁴⁴Ice Agustin, *Tenaga Ahli Infrastruktur Daerah*, Wawancara 25 Juli 2019

Infrastruktur Desa melakukan investigasi dan opname kegiatan fisik pembangunan pembukaan badan Jalan Usaha Tani, Jembatan dan Platdeuker. Dan fisik terbukti dibangun dan kualitas cukup baik, dengan total dana sesuai tertera di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan *Detail Engineering Desain* tidak didapati oleh Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, menurut Tenaga Ahli Infrastruktur Desa masih ada Dana Desa yang belum direalisasikan oleh Desa. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa berkoordinasi dengan Kecamatan Pagar Jati guna untuk memfasilitasi penanganan masalah Desa Renah Jaya. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa diundang oleh Kecamatan untuk menghadiri rapat penanganan masalah di Kantor Kecamatan Pagar Jati yang dihadiri oleh Pejabat Sementara. Kepala Desa, dan disepakati bahwa Pejabat Sementara. Kepala Desa segera menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2018 ke Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling Lambat tanggal 04 Maret 2019, sehingga dapat diketahui berapa Dana Desa dan Alokasi Dana Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jika Pejabat Sementara. Kepala Desa sampai tgl 04 Maret tidak menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, maka Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meminta diaudit oleh Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Renah Jaya.⁴⁵

“...Menurut Hamida Operator Komputer bahwa pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan karena adanya konflik antara pihak sekolah dengan pihak Badan Permusyaratan Desa yang berkaitan dengan tanah yang akan dibangun dan dana tersebut tidak dapat direalisasikan...”⁴⁶

Menurut Kepala Desa Sucipto sebagai Pengelola Dana Desa. Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk digunakan pembangunan seperti contohnya: jalan menuju akses perkebunan, gang desa-desa, membangun paud, dan membangun posyandu. Pembangunan tersebut sudah mencapai 90% dan 10% tidak dapat terelisasikan karena pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa/kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Benteng tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya dikarenakan tempat yang dilaksanakan tersebut mengalami kendala seperti hari hujan jadi, masyarakat lingkungan tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Akhirnya dana desa tersebut tidak dapat digunakan

⁴⁵. Nila, *Operator Komputer*, Wawancara tanggal 17 Juli 2019.

⁴⁶. Hamida, *Operator Komputer*, Wawancara tanggal 17 Juli 2019.

semestinya atau tidak mencapai target yang diharapkan sebelumnya. Dengan itu dana tersebut disetor/dikembalikan ke kas negara.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah itu dananya belum terelisasikan sehingga pembangunan ekonomi tersebut tidak berjalan dan masyarakat terhambat dalam aktivitasnya.

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Dana Alokasi Umum Kantor DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi dengan Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Betapa tidak, al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bisa ditentukan melalui kerja keras serta menghilangkan sifat malas (fakir).

Konsep ini juga pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam al-Qur'an, sunnah, maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa desawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terbelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya.

Berikut ini prinsip-prinsip Ekonomi Islam, salah satunya yaitu Akhlak yang merupakan Prinsip yang merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar atau jujur), *tabligh* (menyampaikan kebenaran),

⁴⁷. Sucipto, *Kepala Desa*, Wawancara tanggal 28 Agustus 2019.

amanah (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelekt). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF. Teori yang berkaitan dengan masalah judul yang diangkat disini salah satunya adalah shidiq (jujur).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.⁴⁸ (Q.S. At-Taubah:119).

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنَّاتٌ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling besar”.⁴⁹ (Q.S. Al-Maidah:119)

Dilihat dari berbagai sudut pandang sistem realisasi dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. hal ini dapat dilihat dari sistem kegiatan pembangunan yang telah ditargetkan sebelumnya dengan dana desa dan apabila sistem tersebut tidak sesuai atau belum mencapai target yang telah ditentukan maka perangkat desa yang mengelola dana tersebut berlaku jujur dan mengembalikan sisa dana yang tidak terpakai ke kas negara. oleh sebab itu, maka sistem semacam ini

⁴⁸. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma), h. 206.

⁴⁹. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma), h. 127.

sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mana di dalam firman surah At-Taubah dan surah Al-Maidah ayat 119 yang mengatakan sangatlah penting untuk berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan tanpa merugikan orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang penulis simpulkan yaitu :

1. Realisasi dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah di kabupaten benteng adalah dana tersebut dari pemerintah pusat departemen dalam negeri turun langsung ke rekening desa. Perangkat desa mengelola dana tersebut dengan diawasi oleh kantor DPMD melalui sekretariat tenaga ahli. Dalam dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah tidak dapat berjalan dengan semestinya karena banyaknya hambatan dalam pembuatan pembangunan tersebut yang tidak dapat terselesaikan dengan waktu yang ditentukan. Sehingga pembangunan daerah dapat terselesaikan 90% dan 10% tidak

terselesaikan. Anggaran yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas negara karena tidak mencapai target yang telah ditentukan.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem realisasi dana alokasi umum dan pembangunan ekonomi daerah sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. hal ini dapat dilihat dari sistem kegiatan pembangunan yang telah ditargetkan sebelumnya dengan dana desa dan apabila sistem tersebut tidak sesuai atau belum mencapai target yang telah ditentukan maka perangkat desa yang mengelola dana tersebut berlaku jujur dan mengembalikan sisa dana yang tidak terpakai ke kas negara.

B. Saran

Setelah melakukan telaah dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah dalam Ekonomi Islam, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat Depertemen Dalam Negeri: Penelitian yang berkaitan dengan dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah dalam Pemerintahan Pusat Depertemen Dalam Negeri harus lebih mengawasi agar dana yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang yang dijalankan sehingga pembangunan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan lancar.
2. Bagi Seketariat Tenaga Ahli: Tenaga Ahli harus lebih mengawasi dana-dana di Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang langsung turun ke

desa agar dana tersebut tidak di salah gunakan dan pembangunan akan berjalan sesuai dengan anggaran yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Ice. *Tenaga Ahli Infrastruktur Daerah*. Wawancara 25 Juli 2019
- Ahmed, Khurshid. *Economic Development in an Islamic Fremwork” dalam Studies Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University. 1976
- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syari’ah*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2005.
- Al Maududi, Abul A’la. *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam, terj. Adnam Syamn*. Jakarta : Media Dakwah. 1985.
- Al Muhit, Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf al-Andalusia, al-Bahr . *Juz. VII (Cet. I; Beirul: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1413 H/1993 M)*
- Al Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi, Juz. XXX (Cet. I; Mesir: Mustafa al-Babi al Halibi wa Auladih, 1365 H/1946 M)*
- Al Zuhaili, Wahbah ibn Mustafa. *al-Tafsir al-Wasit, Juz. I (Cet. I; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1422 H)*
- Ambulan, Afrizal Ambulan. *Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif*. Wawancara pada tanggal 23 Juli 2019

- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Basori, Khabib. *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri. 2007.
- Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought. 1993.
- Elfrello. *Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi Bengkulu*. Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019
- Ginting, Erwin. *Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo*. skripsi, [http://C:/Users/HP/Downloads/08E01542\(1\).pdf](http://C:/Users/HP/Downloads/08E01542(1).pdf)
- Hamida. *Operator Komputer*. Wawancara tanggal 17 Juli 2019
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Joni, Afrizan. *Sekretariat Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Wawancara pada tanggal 23 Juli 2019
- Kasim, Darlin. *Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar*. Wawancara pada tanggal 23 Juli 2019
- Mawarni¹, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh),” *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. II. Mei. 2013.
- Mersyah, Rohidin. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Bengkulu, dikutip dari <http://dpmd.bengkuluprov.go.id/index.php/downloads/sekretariat/250- visi-dan-misi-dinas-pmd-provinsi-bengkulu>. pada hari rabu, tanggal 12 Juni 2019, pukul 14:30 WIB
- Mersyah, Rohidin. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu*. dikutip dari <http://dpmd.bengkuluprov.go.id/index.php>. Pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019. Pukul 20.25 WIB

- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Nila. *Operator Komputer*. Wawancara tanggal 17 Juli 2019
- Nopitasari, Erlinda Dwi. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal*. 2007. Skripsi. [http: file:///C:/Users/HP/Downloads/1.%2520Erlinda%2520dwi%2520nopitasari.pdf](http://file:///C:/Users/HP/Downloads/1.%2520Erlinda%2520dwi%2520nopitasari.pdf)
- Novlie Manopo, dkk. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*, dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/45050-ID-analisis_efisiensi-dan-efektivitas-pengelolaan-keuangan-daerah-kabupaten-minahas.pdf, pada hari senin, tanggal 6 mei 2019, pukul 19:20 WIB
- Pendamping Desa. *Laporan Bulanan Bulan April 2019*. Bengkulu: SATKER. 2019
- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*, Jakarta: kementriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2018.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Rizal, Veithzal, et.al. *Principle Of Islamic Finance (Dasar-dasar Keuangan Islam)*. Yogyakarta: BPFE. 2012.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2005.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Supriyatna, Muhamad Yusup. *Kerjasama Penggarapan Sawah dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i*, dikutip dari <http://repository.syekhnurjati.ac.id/Pdf>, Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Pukul 19.20 WIB

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tip. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Muntia Gustika Ratu
Nim : 1916130009
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji
1.	Rabu/ 25 April 2018	Septa Darma Gumay	Pelaksanaan Program Portal SIAKAD IAIN Bengkulu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan AKADEMIK FEBI	1. Andang Sunarto, Ph.D 2. Yosy Arisandy, MM	1. 2.
2.	Rabu/ 25 April 2018	Risa Oktavia	Manajemen Strategi Kemitraan Waralaba Sektor Kuliner Perspektif Etika Bisnis Islam	1. Drs. Khairuddin, M. Ag 2. Badaruddin, MM	1. 2.
3.	Rabu, 25 April 2018	Dedo Adeffiyu	Proktet Jual beli dan Penetapan Harga Ikan Laut Dipasar Muara Aman Tinjauan Ekonomi Islam	1. Dr. Nurul Hak, MA 2. Nilda Susilawati, M. Ag	1. 2.
4.	Kamis 26 April 2018	Melany Koes Haryono	Faktor-faktor Penghambat Pengembangan Usaha Sirar Roti Di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu	1. Dra. Fatimah Yunus, MA 2. Khairiah El-Wardah, MA	1. 2.
5.	Sabtu, 28 April 2018	Helty Try Utami	Prospek Usaha Laundry Untuk Meningkatkan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada Usaha "Rogo Laundry" Kampung Bali Kota Bengkulu).	1. Dr. Nurul Hak, MA 2. Nilda Susilawati, M. Ag	1. 2.
6.	Sabtu, 28 April 2018	Andri Saputra	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Produk Paket Perdana (Studi pada PT Telkomsel Cabang Bengkulu)	1. Dr. Nurul Hak, MA 2. Nilda Susilawati, M. Ag	1. 2.
7.	Sabtu, 28 April 2018	Alex Sander	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Juru Parkir Dalam Melayani Konsumen Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu	1. Dr. Nurul Hak, MA 2. Nilda Susilawati, M. Ag	1. 2.
8.	Jumat, 02 November 2018	Riki Harmadi	Analisis Strategi meningkatkan Profitabilitas pada PT. BM Syariah cabang Bengkulu	1. Andang Sunarto, Ph.D 2. Yosy Arisandy, M.M.	1. 2.

Mengetahui,
Kajur Ekonomi Islam

Desi Isnaini, MA

NIP 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : MUNTIA GUSTIKA RATU
 NIM : 1516130004
 PRODI : Ekonomi Syariah
 SEMESTER : 7

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM AL-IJARAH PERBENGKELAN MOBIL ALADIN DI KOTA BENGKULU
2. ANALISIS PENDAPATAN WARGA KOTA BENGKULU TERHADAP MINAT BELI PADA TOKO BATAM (STUDI KASUS PASAR PANORAMA)

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : Belum ada yg membahas

Pengelola Perpustakaan

[Signature] 22/10/18

- b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : ACE - No. 2

Pembimbing Akademik

[Signature] 24/10/18

- c. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan : Apa kaitan pendapatan bergenggang dgn teori ekonomi Islam

Kaprodi

[Signature]
 Eka sti Wahyuni, m.p.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah : Analisis Pendapatan Warga Kota Bengkulu Terhadap Minat Beli Pada Toko BATAM (STUDI KASUS PASAR PANORAMA)

Mengetahui

Bengkulu, 31 Oktober 2018

an Kujur Ekis

Mahasiswa

[Signature]

[Signature]
 Muntia Gustika Ratu

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 19 Date April 28,2019

Characters 146 Exclude Url

0%

Plagiarism

100%

Unique

0

Plagiarized
Sentences

1

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

realisasi dana alokasi umum kantor bpmpd provinsi terhadap pembangunan ekonomi daerah kantor bpmpd dikabupaten benteng ditinjau dari ekonomi islam

Sources

Similarity



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

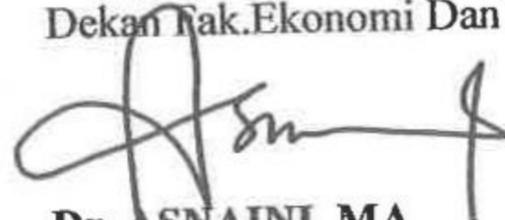
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : ..Kamis/..14...Februari...2019
Nama Mahasiswa : ..Muntia..Gustika..Ratu.....
NIM : ..1516130004.....
Jurusan /Prodi : ..Ekonomi..Islam../Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDATANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. ..Dr. Nurul Hak, M.A.	 1.
		2. ..Yosy Arisandy, M.M.	 2.

Mengetahui,
Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. ASNAINI, MA
NIP. 19730412 199803 2 003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Muntia Gustika Ratu

JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul	Gaul

Bengkulu,
Penyeminar, I, 2024

Dr. Nurul Hani, M.A.

NIP. 196606161995031002



SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muntia Gustika Patu
NIM : 1516130009
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari Kamis.....
tanggal 17 Februari 2019 atas saran dan perbaikan dari penyeminar I dan II maka proposal dengan
judul : Analisis Pendapatan warga kota Bengkulu terhadap minat beli
pada toko batam (Studi kasus pasar Panorama)

diubah menjadi : Realisasi Dana alokasi umum kantor BKM PD Provinsi terhadap
Pembangunan ekonomi daerah kantor BKM PD di kabupaten Benteng
di tinjau dari ekonomi Islam
namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa
diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 23 April 2019

Peneliti

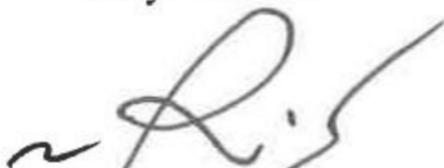

Muntia Gustika Patu

Mengetahui
Pengelola Perpustakaan FEBI

 23/04/19

Menyetujui

Penyeminar I


Dr. Nurul Hake, MA

Penyeminar II


Fery Arisandy, MM

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor BPMPD Provinsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng ditinjau dari Ekonomi Islam" yang disusun oleh:

Nama : Muntia Gustika Ratu
NIM : 1516130004
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal: 14 Februari 2019

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, April 2019

Tim Penyeminan

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Pembimbing II



Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0581/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Yosi Arisandy, MM
NIP. : 198508012014032001
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Muntia Gustika Ratu
NIM : 1516130004
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : REALISASI DANA ALOKASI UMUM KANTOR BPMPD
PROVINSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
KANTOR BPMPD DI KABUPATEN BENTENG DITINJAU
DARI EKONOMI ISLAM.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 9 Mei 2019
Dekan

Dr. Asnaini, MA²
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

REALISASI DANA ALOKASI UMUM KANTOR DPMD PROVINSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN BENTENG DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Nama : Muntia Gustika Ratu
Nim : 1516130004
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :

B. Wawancara Kepada Kepala Bidang DPMD Provinsi Bengkulu

1. Apa visi dan misi kantor DPMD provinsi dalam pembangunan ekonomi daerah?
2. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan visi dan misi tersebut?

3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah melalui program dana alokasi umum?
4. Berapa dana yang turun untuk pembangunan ekonomi daerah dikabupaten benteng?
5. Bagaimana peran kantor DPMD dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program dana alokasi umum?
6. Bagaimana strategi atau gagasan dari kantor DPMD untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program dana alokasi umum?
7. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara kantor DPMD provinsi dengan kantor DPMD dikabupaten benteng terhadap mekanisme penyaluran dana alokasi umum?
8. Kapan kantor DPMD memberi bantuan dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah?
9. Siapa pelaksanaan pengelolaan dana alokasi umum?

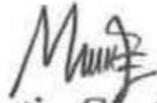
C. Wawancara Kepada Sekretariat Tenaga Ahli Di Kabupaten Benteng Kecamatan Pondok Kelapa

1. Siapa pelaksanaan pengelolaan dana alokasi umum?
2. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan yang dilaksanakan?
3. Bagaimana proses pengelolaan dana alokasi umum?
4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait dana alokasi umum?

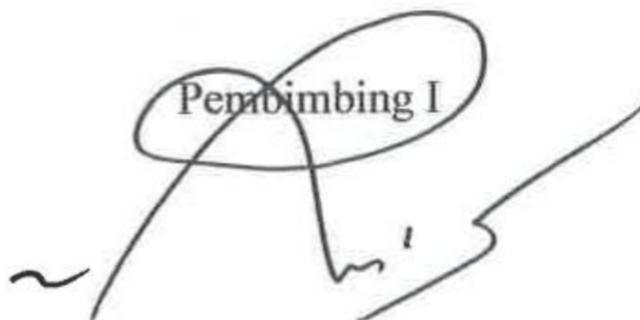
5. Apa saja bentuk penyaluran dana alokasi umum yang digunakan oleh sekretariat tenaga ahli dikabupaten benteng?
6. Berapa dana yang dikeluarkan dalam pembangunan tersebut?

Bengkulu, April 2019

Penulis


Muntia Gustika Ratu
NIM 1516130004

Mengetahui


Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP19660616 199503 1 002

Pembimbing II


29/5 - 2019
Yosy Arisandy, MM
NIP19850801 201403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

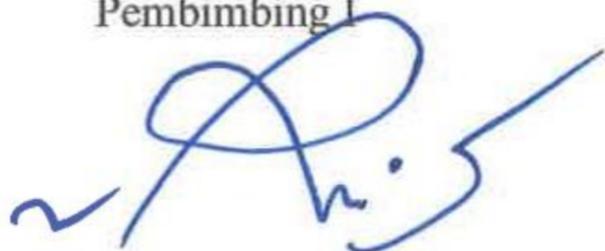
Proposal Skripsi berjudul "Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor BPMPD Provinsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng ditinjau dari Ekonomi Islam" yang disusun oleh:

Nama : Muntia Gustika Ratu
NIM : 1516130004
Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

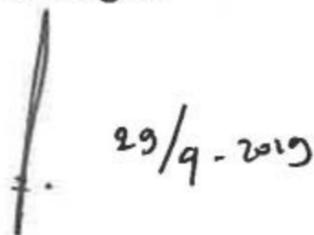
Bengkulu, April 2019 M
Sya'ban 1440 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Pembimbing II



Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0891/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Bengkulu, 19 Juni 2019

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah
di -
Bengkulu Tengah

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun
Akademik 2018/2019 atas nama :

Nama : Muntia Gustika Ratu

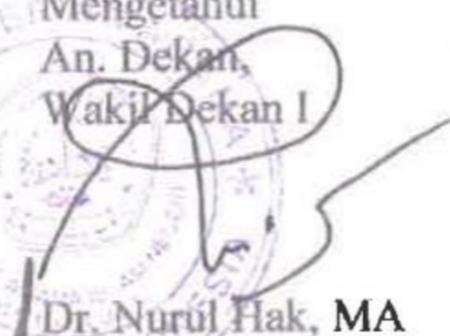
NIM : 1516130004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor
DPMD Provinsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten
Benteng Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

Tempat Penelitian : Kantor DPMD Provinsi Bengkulu dan Sekretariat di
Kabupaten Benteng Kecamatan Pondok Kelapa.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bengkulu-Curup KM. 25 Karang Tinggi Bengkulu Tengah
Telp/Fax (0736) 5611138 Email : bpmptkab.bengkulutengah@gmail.com

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070 /345/ IP / DPMPTSP/VI/ 2019

- Dasar :
1. Surat Dari Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0891//In.11/F.IV/PP.00.9/06/2019 Tanggal 19 Juni 2019 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.

Nama / NPM : **MUNTIA GUSTIKA RATU/ 1516130004**

Pekerjaan : Mahasiswa/i

Maksud : Melakukan Penelitian

Judul Proposal Penelitian : **"Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah di Tinjau dari Ekonomi Islam"**

Daerah Penelitian : Kantor DPMD Provinsi Bengkulu dan Sekretariat di Kabupaten Benteng Kecamatan Pondok Kelapa

Waktu Penelitian/Kegiatan : 26 Juni 2019 s/d 26 Juli 2019

Penanggung jawab : Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini memberikan Izin Penelitian yang diadakan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Surat Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah

Pada tanggal, 26 Juni 2019

KEPALA DINAS,



ENDANG SUMANTRI, S.H.

NIP. 19660228 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Yth. Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Cendana No. 18 Telp/Fax. (0736) 21383 Bengkulu, e-mail : bpmpd.bengkuluprov@gmail.com, web-site: www.bpmpd.bengkuluprov.go.id

Nomor : 090/ 318 /DPMD/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elfrello,S. Sos. M,Si
NIP : 19700927 199703 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menerangkan bahwa Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muntia Gustika Ratu
Nim : 1516130004
Prodi : Ekonomi Islam
Fakultas : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Telah selesai melaksanakan penelitian Di Kantor DPMD Provinsi Bengkulu dengan judul **“REALISASI DANA ALOKASI UMUM KANTOR DPMD TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DIKABUPATEN BENTENG DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”**.

Demikianlah surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, 18 Juli 2019

Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



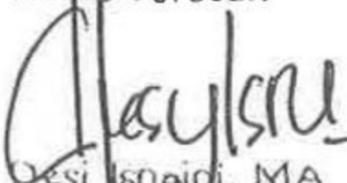
Elfrello, S.Sos. M,Si

NIP. 19700927 199703 1 003

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

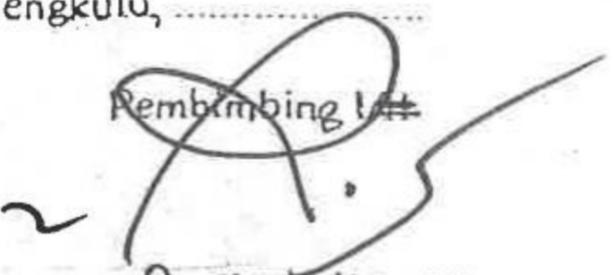
Nama Mahasiswa : Muntia Gustika Ratu Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1516130004 Pembimbing I# : Dr. Nurul Hake, MA
 Judul Skripsi : Realisasi Dana Alokasi umum kantor DPMD Provinsi Terhadap
 Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng di tinjau dari
 Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Prof
1.		Bab I	ace.	R.
2.		Bab II	ace.	R.
3.		Bab III	ace.	R.
4.		Bab IV	ace.	R.
5.		Bab V	ace.	R.
6.		ace.		R.

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

 Desi Isnaini, MA
 NIP. 197412022006042001

Bengkulu,

Pembimbing I#

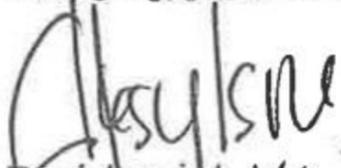


(Dr. Nurul Hake, MA)
 NIP. 196606161995031002

LEMBAR Bimbingan Skripsi

Nama Mahasiswa : Muntia Gustika Ratu Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1516130004 Pembimbing II : Yosy Arisandy, MM
 Judul Skripsi : Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor BPMPD Provinsi Terh
 Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Banteng ditinjau dari
 Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1.	Kamis / 16-5-2019	Bab 1 - III	Ubah format proposal menjadi skripsi pedoman wawancara SW + 1 H.	/
2.	Selasa / 21-5-2019	Pedoman wawancara	1. Bedakan pertanyaan untuk BPMPD & Masyarakat. 2. Format penulisan	/
3.	Rabu / 29-5-2019	Pedoman wawancara	Acc	
4.	Selasa / 30-5-2019	Bab IV	Perbaikan penulisan, Tgn disingkat	/
5.	Selasa / 6-8-2019	Bab V	Perbaikan saran	/

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

 Desi Isnaini, MA
 NIP. 197412022006042001

Bengkulu,
 Pembimbing II

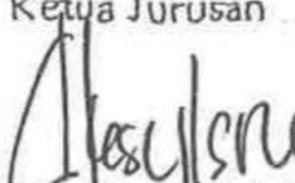
 Yosy Arisandy, MM
 NIP 198508012014032001

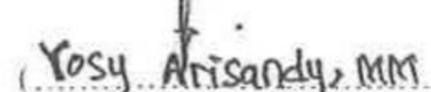
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muntia Gustika Patu Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1516130004 Pembimbing #1 : Yosy Arisandy, MM
 Judul Skripsi : Realisasi Dana Alokasi Umum Kantor DPMD Provinsi Terahadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Benteng di tinjau dari Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
6.	Kamis / 8 - 8 - 2019	part note	h. 49, 51 & 53	/
7.	Jumat / 9 - 8 - 2019	Bab 1 → V	Bab V Dapat dilanjutkan ke pembimbing 1 (ACK)	/

Bengkulu,

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

 Desil Isnaini, MA
 NIP. 197412022006042001

Pembimbing #1

 Yosy Arisandy, MM
 NIP. 198508012019032001

